

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN PELABUHAN PERIKANAN DALAM Mendukung Peningkatan Hasil Produksi Masyarakat Nelayan

(STUDI KASUS PELABUHAN PERIKANAN BAREK MOTOR, KABUPATEN BINTAN)

Dhea Amanda¹; Syahdan Naufal Ghinanda²; Jepri Jaya³

Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3}

adhea0510@gmail.com¹

ABSTRAK

Kondisi geografis Indonesia dengan sebagian besar negaranya merupakan perairan, dapat menjadi salah satu aspek peningkatan perekonomian negara. Dengan salah satu aspek krusialnya yaitu sarana dan prasarana berupa Pelabuhan perikanan sebagai pusat kegiatan penangkapan, pendaratan, dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi program penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Berek Motor, di Berek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu, guna mengetahui implementasi dari program penyediaan sarana dan prasarana berupa pelabuhan perikanan tangkap yang terdapat dalam Renstra DKP 2021-2026 dalam mendukung peningkatan hasil produksi masyarakat nelayan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh George C. Edwards III. Ia menawarkan empat indikator penting dalam mempromosikan implementasi yang efektif sebagai jawaban atas penelitian ini yaitu, sumber daya, struktur birokrasi, sikap, dan komunikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan sudah dilakukan, terkait pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sudah termuat dalam perencanaan, namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran daerah. Walaupun demikian, dengan adanya Pelabuhan perikanan tersebut telah berdampak positif dalam mendukung peningkatan hasil produksi nelayan.

Katakunci: implementasi, pelabuhan perikanan, nelayan

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, sektor perikanan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia merupakan Negara Kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia. Yang mana pada tahun 2019 sebanyak 16.671 jumlah pulau Indonesia yang sudah dilaporkan ke PBB melalui sidang UNGEGN. Selanjutnya pada tahun 2020 tertera pada Gasetir Nasional ada penambahan 100 pulau di Indonesia menjadi 16.771 pulau (Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, n.d.). Wilayah Negara

Republik Indonesia meliputi wilayah daratan dan wilayah air yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, beserta tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (Undang-Undang RI Nomor 43 Tentang Wilayah Negara, 2008).

Kondisi geografis ini menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian negara. Salah satu aspek krusial dalam sektor perikanan adalah sarana prasarana pelabuhan perikanan yang berperan sebagai pusat kegiatan penangkapan, pendaratan, dan pemasaran hasil tangkapan ikan. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, penting bagi negara-negara untuk terus mengembangkan sarana prasarana pelabuhan perikanan guna memperkuat sektor perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Undang-Undang RI Nomor 7 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, 2016), nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Jumlah nelayan di Indonesia sendiri menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap 2021 sebanyak 2.925.818. Dengan jumlah nelayan laut sebanyak 2.359.264 dan nelayan PUD sebanyak 566.554.

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah laut yang luas. Berdasarkan kondisi wilayah tersebut banyak penduduk provinsi Kepulauan Riau yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2021, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, jumlah nelayan di Provinsi Kepulauan Riau mencapai angka 98.797 orang, namun jumlah tersebut merupakan jumlah nelayan yang memiliki kartu “Kusuka” yang merupakan kartu khusus untuk nelayan. Sedangkan untuk jumlah nelayan di Provinsi kepulauan Riau secara keseluruhan sekitar 194.225 orang, baik yang memiliki kartu maupun tidak. Untuk Kabupaten Bintan sendiri memiliki jumlah nelayan pada tahun 2021 sebanyak 7.946 orang. Jumlah ini adalah jumlah nelayan di Kabupaten Bintan yang memiliki kartu “Kusuka”, sedangkan untuk jumlah keseluruhan nelayan di Kabupaten Bintan adalah 36.521 orang.

Tabel 1. Data Jumlah Nelayan di Indonesia Menurut Sub Sektor Perikanan Tangkap

JUMLAH NELAYAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL (ORANG)	2,620,277	2,755,178	2,748,908	2,640,095	2,739,883	2,702,664	2,643,902	2,667,572	2,637,269	2,736,218	2,849,473	2,925,818
NELAYAN LAUT	2,162,442	2,265,213	2,278,388	2,164,969	2,210,195	2,275,139	2,265,859	2,289,529	2,292,024	2,088,959	2,359,064	2,359,264
NELAYAN PUD	457,835	489,965	470,520	475,126	529,688	427,525	378,043	378,043	345,245	647,259	490,409	566,554

Sumber: Statistik.kkp.go.id

Tabel 2. Data Statistik Perikanan Tangkap Kepri Tahun 2021

DATA STATISTIK PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2021															
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU															
I. JUMLAH RTP, NELAYAN, API, DAN KAPAL															
No	Kab/Kota	Σ RTP (buah)	Σ Nelayan/Buruh (orang)	Σ Nelayan (orang)	Σ API (unit)	Σ KAPAL (unit)								JUMLAH TOTAL KAPAL PER KAB/KOTA	
						PTM	MT_0005	KM_0003	KM_0005_0010	KM_0010_0020	KM_0020_0030	KM_0030_0050	KM_0050_0100		KM_0100_0200
1	Bintan	3,217	7,946	11,163	3,217	1,390	676	1,290	231	194	112	0	0	0	3,893
2	Karimun	8,528	16,214	24,742	8,528	2,938	0	4,364	380	44	0	126	0	0	7,852
3	Kepulauan Anambas	2,923	7,864	10,787	2,923	472	0	2,397	36	18	0	0	0	0	2,923
4	Kota Batam	12,001	37,873	49,874	12,019	2,753	3,946	4,488	566	78	62	126	0	0	12,019
5	Kota Tanjungpinang	364	1,032	1,396	364	0	0	267	54	3	35	0	3	2	364
6	Lingga	8,939	13,985	22,924	8,939	3,467	0	5,423	49	0	0	0	0	0	8,939
7	Natuna	8,585	13,883	22,468	8,585	3,370	0	3,466	856	775	90	28	0	0	8,585
Grand Total		44,557	98,797	143,354	44,575	14,390	4,622	21,695	2172	1112	299	280	3	2	44,575

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 3. Data Statistik Perikanan Tangkap Kepri Tahun 2021

II. JUMLAH PRODUKSI DAN NILAI PRODUKSI			
NO	Kab/Kota	JUMLAH PRODUKSI (Ton)	NILAI PRODUKSI (Ton)
1	Bintan	57,131,257	1,844,288,104,000
2	Karimun	11,721,082	472,695,232,400
3	Kepulauan Anambas	24,029,736	536,716,604,000
4	Kota Batam	39,040,944	1,424,994,433,100
5	Kota Tanjungpinang	2,668,960	92,893,672,000
6	Lingga	35,966,287	1,466,143,158,000
7	Natuna	132,632,623	2,859,503,077,000
Grand Total		303,190,889	8,697,234,280,500

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Kijang merupakan salah satu kota yang terletak di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi perikanan yang besar. Nelayan di Kijang menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan menyumbang secara signifikan terhadap produksi ikan di wilayah tersebut. Namun, tantangan yang dihadapi oleh nelayan di Kijang adalah infrastruktur pelabuhan perikanan yang belum memadai. Kondisi ini membatasi kemampuan nelayan untuk mengoptimalkan potensi perikanan mereka dan mengakses pasar yang lebih luas.

Upaya untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap, pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan telah merencanakan kebijakan terkait hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 2021-2025 Bab VI tentang Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan, yang mana tertuang di dalamnya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. Dalam program tersebut termuat kegiatan di dalamnya tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk melihat implementasi program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan di

Barek Motor, Kijang, Kabupaten Bintan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui sejauh mana program tersebut berhasil meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai pengembangan pelabuhan perikanan ini pun sebelumnya sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian pertama tulis oleh (Salim et al., 2021) yang berjudul “studi pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan pantai Sadeng, Girisubo, Gunung Kidul. Dimana penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif melalui observasi, interview dan dokumentasi. Pada penelitian ini berfokus kepada peningkatan fasilitas pelabuhan dari tipe C ke tipe B karena meningkatnya aktivitas bongkar muat di pelabuhan sadeng. Dan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelabuhan sadeng ini telah sesuai syarat untuk melakukan peningkatan tipe C ke tipe B yang mencakup kesiapan dalam fasilitas, fungsional dan fasilitas penunjang.
2. Selanjutnya penelitian yang kedua di tulis oleh (Kristiyanti et al., 2020) yang berjudul “Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Dalam Menunjang Kegiatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kabupaten Batang” dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui wawancara, observasi dan studi literatur. Dimana dalam penelitian berfokus untuk menuntut adanya pembangunan pelabuhan perikanan di kabupaten batang untuk membantu ekonomi masyarakat nelayan di kabupaten batang karena dengan adanya pelabuhan perikanan ini bukan hanya untuk arus perpindahan penduduk dan barang melainkan untuk membantu menunjang kegiatan ekonomi nelayan Kabupaten batang. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Batang ialah salah satu daerah yang masih belum memiliki sarana prasarana perhubungan laut yang cukup memadai faktor inilah yang dijadikan penghambat perkembangan ekonomi nelayan Batang.
3. Selanjutnya penelitian yang ketiga tulis oleh (Setiawan et al., 2019) yang berjudul “Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Untuk Meningkatkan Fungsi Pelabuhan Perikanan”. Pada penelitian menggunakan metode studi kasus dengan menganalisis data menggunakan analisis strengths opportunities weaknesses threats (SWOT) dan quantitative strategic planning management (QSPM). Dan penelitian ini berfokus untuk menentukan strategi bagaimana yang cocok untuk pengembangan pelabuhan perikanan pantai Bajomulyo dalam meningkatkan fungsinya. Dan dari penelitian ini menghasilkan bahwasanya fungsi pelabuhan perikanan pantai Bajomulyo tidak berjalan dengan baik disebabkan tidak adanya ketersediaan fasilitas pelabuhan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan masyarakat pantai Bajomulyo.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada implementasi program penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan Barek Motor, di

Barek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh George C. Edwards III. Menurut George C. Edwards III, pendekatan implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis melihat berbagai elemen saling berinteraksi dan berdampak (Septian, 2017). Untuk menentukan bagaimana karakteristik ini mempengaruhi aplikasi, mereka harus ditampilkan. Edward menggarisbawahi bahwa dua isu utama yang harus dijawab untuk memulai penelitian implementasi, yaitu apa persyaratan untuk kebijakan implementasi dan apa faktor penentu utama keberhasilan implementasi kebijakan. Edward menawarkan empat indikator yang sangat penting dalam mempromosikan implementasi yang efektif sebagai jawaban atas pertanyaan ini.

1. Sumber Daya

Sumber daya memiliki pengaruh yang signifikan dalam implementasi kebijakan. Edward III mengemukakan bahwa “bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuanketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif”. Sumber daya mengacu pada semua sumber yang dapat digunakan untuk membantu melaksanakan kebijakan dengan sukses.

2. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan, serta implementasi dan penciptaan budaya birokrasi yang suportif, sangat bergantung pada struktur birokrasi. Pembagian tugas dan uraian tugas diatur dengan jelas dalam sistem birokrasi. Hal tersebut memanfaatkan SOP saat ini pada penerapannya. Jika ada tantangan dalam pelaksanaan pembangunan terminal, kerangka birokrasi yang baik akan memacu kemajuan yang efektif. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien, tugas pokok dan fungsi tidak akan pernah lepas dari suatu birokrasi dan kewenangannya dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

3. Sikap

Sikap pelaksana atau aparatur merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan. Jika aparatur sependapat dengan tujuan kebijakan yang akan dilaksanakan, mereka akan dengan senang hati melaksanakannya; namun, jika pendapat mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi akan menghadapi beberapa masalah, dan hasil program yang diinginkan tidak akan terwujud. Ketika mengimplementasikan kebijakan, koneksi dan komunikasi dalam birokrasi internal, daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang muncul, dukungan dari eksternal atau kelompok sasaran, serta dukungan individu, semuanya merupakan faktor yang sangat penting yang digambarkan oleh sikap lembaga pelaksana.

4. Komunikasi

Menurut (George, 1980) dalam jurnal (Kalalo et al., 2018), penyampaian informasi, ide, keterampilan, aturan dan sebagainya melalui cara-cara tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menjadikan komunikasi sebagai aspek yang sangat penting. Untuk menjamin bahwa pesan tersampaikan dan informasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan tidak terdistorsi, keterampilan komunikasi sangat penting. Dalam kajian ini yang dimaksud dengan “komunikasi” adalah koordinasi antara pelaksana kebijakan dengan pihak terkait sesuai dengan maksud dan tujuan, serta melakukan sosialisasi atau komunikasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dipahami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di pelabuhan perikanan Berek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau dengan waktu penelitian 14 hari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data melalui studi literatur, observasi, dan wawancara. Percakapan yang memiliki tujuan tertentu disebut wawancara.

1. Usman (2008) berpendapat bahwa temuan kajian literatur dapat menjadi titik awal dan landasan untuk mendeskripsikan dan mengelaborasi masalah yang akan diselidiki, serta memberikan konteks mengapa masalah tersebut penting untuk diselidiki. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi literatur yang merujuk pada buku-buku, jurnal-jurnal, dan website-website resmi untuk memperoleh data atau informasi (Usman & Akbar, 2008).
2. Menurut Usman (2008), observasi adalah pencatatan secara metodis terhadap kejadian-kejadian yang diselidiki. Pengamatan non-partisipan dilakukan, di mana peneliti hanya mengamati peristiwa yang sedang diselidiki. Observasi langsung dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh tentang penekanan penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini di pelabuhan perikanan Berek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Usman & Akbar, 2008).
3. Menurut Arikunto (2006), proses wawancara dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama adalah seorang *Interviewer* atau pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (*Interview*). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Tanjungpinang dan masyarakat nelayan (Arikunto, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan

Kijang merupakan salah satu daerah yang berada di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Menjadi nelayan merupakan salah satu profesi masyarakat yang tinggal di Kijang karena memiliki pantai yang panjang dan luas, dan juga sumber daya laut yang melimpah. Nelayan yang ada juga mempunyai cara kerja yang berbeda, salah satunya nelayan tangkap. Dalam mendukung kemudahan dalam pekerjaan yang mereka jalankan, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan menjadi faktor pendukung adalah adanya pelabuhan perikanan. Pelabuhan perikanan merupakan infrastruktur yang berfungsi untuk memudahkan masyarakat yang berguna sebagai tempat pendaratan dan distribusi hasil tangkapan dan sebagai penyediaan sarana bongkar muat hasil tangkapan, serta sebagai tempat perawatan dan perbaikan kapal perikanan yang membutuhkan perawatan rutin dan perbaikan. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau membuat kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau 2021—2026 yaitu kebijakan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan. Untuk melihat implementasi kebijakan tersebut peneliti mengacu pada teori implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh George C. Edwards III.

Menurut Edwards III dalam (Mansur, 2021), pelaksanaan kebijakan merupakan bagian dari proses kebijaksanaan, yang tempatnya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi yang muncul dari kebijaksanaan tersebut (output, outcome). Edward III menawarkan faktor-faktor yang dianggap berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing faktor saling berpengaruh terhadap faktor lainnya (Kalalo et al., 2018).

Sumber daya adalah salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya harus mendukung pelaksanaan kebijakan. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, sumberdaya informasi dan kewenangan. Pelaksanaan kebijakan publik harus dilakukan dengan hati-hati, jelas, dan konsisten, tetapi jika dalam pelaksanaan kebijakan publik tersebut kekurangan sumber daya yang dibutuhkan, kebijakan tersebut kemungkinan besar tidak akan dilaksanakan secara efisien. Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan karena tanpa hal tersebut, upaya untuk mengatasi masalah masyarakat atau menawarkan layanan kepada masyarakat hanya akan menjadi sebuah tulisan. Oleh karena itu, sumber daya menjalankan peran penting dalam mempraktekkan kebijakan publik.

Kemampuan pelaksana mengkomunikasikan kebijakan dalam bentuk program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan menunjukkan hasil yang sudah baik. Dari hasil wawancara didapat bahwa sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, sumberdaya informasi dan kewenangan dalam hal mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program sudah baik. Hal ini dilihat dari telah terealisasinya penyediaan infrastruktur pelabuhan perikanan di

Barek Motor, Kijang, Kabupaten Bintan. Di daerah Pelabuhan perikanan tersebut juga terdapat kantor pengawasan. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau bersama pihak syahbandar dari kementerian selalu melakukan pengawasan di pelabuhan perikanan Barek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Struktur birokrasi merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Pembagian tanggung jawab dan kekuasaan yang mereka emban diatur oleh struktur birokrasi, yang berfungsi sebagai panduan mendasar untuk menerapkan kebijakan. Untuk menetapkan kebijakan, menciptakan birokrasi yang produktif, dan mengimplementasikannya, struktur birokrasi sangat penting. Menurut Edward III, kecenderungan perilaku atau karakteristik kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diimplementasikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan yang dimaksudkan.

Cara sebuah kebijakan dijalankan akan sangat dipengaruhi oleh sikap mereka yang melaksanakannya. Kebijakan akan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan jika para pelaksana memiliki sikap yang mendukung, jika tidak, kebijakan tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap orang yang melaksanakan kebijakan mengikuti aturan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangannya. Birokrasi yang berkembang juga akan membantu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, peneliti mendapatkan hasil bahwa para pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara profesional dan kebijakan dalam bentuk program penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan sudah dilakukan di Barek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

Salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik suatu kebijakan diimplementasikan adalah sikap pelaksana kebijakan. Para pelaksana kebijakan akan dengan senang hati melaksanakan tujuan kebijakan jika mereka menyetujuinya. Namun, jika sudut pandang mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, akan ada banyak tantangan dalam menerapkan kebijakan, dan hasil yang diinginkan tidak akan tercapai. Sikap lembaga pelaksana menunjukkan betapa pentingnya dukungan individu, dukungan luar dari kelompok sasaran, dan daya dukung struktur organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya hubungan dan komunikasi dalam internal birokrasi dalam implementasi kebijakan. Akan sulit untuk menerapkan kebijakan secara efektif jika tidak ada dukungan seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, Kebijakan dalam bentuk program penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan sudah dilakukan, terkait pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan sudah termuat dalam perencanaan, namun belum terealisasi karena keterbatasan anggaran daerah.

Yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi melibatkan informasi, pengetahuan, konsep, kemampuan, aturan, dan hal-hal lain kepada pihak yang berwenang untuk menerimanya, ini merupakan aspek yang sangat penting. Untuk memastikan bahwa pesan tersampaikan dan informasi yang diberikan kepada

pelaksana kebijakan tidak terdistorsi, keterampilan komunikasi sangat penting. Koordinasi yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dengan pihak terkait untuk pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam penelitian ini disebut sebagai komunikasi. Selain itu, mereka juga sering melakukan komunikasi atau sosialisasi untuk memperjelas kebijakan yang diterapkan.

Menurut temuan wawancara yang dilakukan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau, komunikasi yang efektif dari para pelaksana kebijakan sangat penting karena akan menumbuhkan pengetahuan tentang tujuan atau sasaran kebijakan dan memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi mereka yang melaksanakannya. Tentunya agar kebijakan tersebut efektif, maka harus disosialisasikan maksud dan tujuannya secara jelas dan konsisten. Karena itu, komunikasi kebijakan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat umum mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Sehubungan dengan implementasi kebijakan dalam bentuk program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan perikanan yang bertujuan untuk mendukung peningkatan hasil produksi masyarakat nelayan yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 2021—2026 yang menjadi fokus penelitian penulis, komunikasi yang terjadi antara pimpinan dan staf pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sudah terlaksana dengan cukup baik namun belum maksimal, kurangnya *support* anggaran dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga turut berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Peningkatan Hasil Produksi Masyarakat Nelayan

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam menjelaskan Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan identik dengan keterbatasan aset, lemahnya kemampuan modal, posisi tawar dan akses pasar. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan wilayah laut (Abidin As, 2019).

Dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau 2021—2026 termuat kebijakan nelayan yang bertujuan untuk Optimalisasi Sektor Kelautan dan Perikanan. Kebijakan tersebut tertuang dalam bentuk program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, keberadaan pelabuhan perikanan ini memiliki dampak terhadap hasil produksi ikan nelayan. Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, penelitian ini berfokus di pelabuhan perikanan Berek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Wawancara yang dilakukan kepada beberapa nelayan yang menggunakan sarana pelabuhan perikanan ini, mendapati bahwa keberadaan pelabuhan ini memberikan dampak positif seperti meningkatkan volume tangkapan ikan. Dengan fasilitas pelabuhan perikanan yang memadai, nelayan di Berek Motor Kijang dapat meluncurkan perahu mereka dengan lebih efisien dan mencapai lokasi penangkapan ikan yang lebih baik.

Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan volume tangkapan ikan mereka secara signifikan serta memberikan peluang lebih besar untuk meningkatkan produksi perikanan. Kemudian dalam hal peningkatan kualitas tangkapan ikan, pelabuhan perikanan biasanya dilengkapi dengan fasilitas penanganan ikan yang baik, seperti tempat pemrosesan dan fasilitas pendinginan. Dengan adanya fasilitas ini, nelayan dapat dengan cepat memproses dan mendinginkan tangkapan ikan mereka sehingga kualitas ikan akan tetap terjaga dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Selanjutnya kemudahan akses pasar, Pelabuhan perikanan menjadi titik distribusi dan perdagangan ikan yang penting. Dengan adanya pelabuhan, nelayan di Berek Motor Kijang dapat dengan mudah menjual hasil tangkapan ikan mereka secara langsung kepada pedagang, eksportir, atau pabrik pengolahan ikan. Akses yang lebih mudah ke pasar ini memungkinkan nelayan untuk mendapatkan harga yang lebih baik untuk produk perikanan mereka dan memperluas jangkauan pemasaran.

KESIMPULAN

Menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia tentu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Salah satu aspek yang diuntungkan yaitu dari sisi maritimnya yang dimana terdapat banyak kekayaan dari perairan laut yang dimiliki. Menjadi nelayan merupakan salah satu profesi yang cukup menjanjikan dalam memenuhi kebutuhan hidup para nelayan. Dengan didukung perairan yang luas tersebut menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu sektor strategis yang dapat mendorong perekonomian negara. Namun semua itu tidak lepas dari adanya dukungan dari pemerintah kepada masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Begitu pula sebaliknya, nelayan juga membutuhkan bantuan dari pemerintah guna menunjang aktivitas dan kegiatan yang mereka lakukan dalam berkehidupan sebagai nelayan. Salah satu aspek yang menjadi faktor pendukung bagi masyarakat nelayan ialah Pelabuhan perikanan. Oleh sebab itu, pelabuhan perikanan dapat menjadi tempat pusat aktivitas nelayan sebagai tempat turun naiknya nelayan untuk bekerja, bongkar muat barang, tempat parkir kapal, dan sebagainya. Selain itu, tidak hanya faktor pendukung yang didapat oleh masyarakat nelayan tersebut, melainkan juga ada faktor penghambat dalam memaksimalkan peningkatan hasil produksi masyarakat. Faktor tersebut ialah belum maksimalnya pengembangan terhadap Pelabuhan perikanan tersebut karena terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Salah satu Pelabuhan perikanan yang menjadi lokasi penelitian ini ialah pelabuhan perikanan di Berek Motor, Berek Motor, Kijang Kota, Kabupaten Bintan.

Pembangunan memang sudah dilakukan, namun terkait pengembangan Pelabuhan yang termuat dalam Renstra DKP Kepri belum terealisasi karena anggaran daerah yang terbatas. Dengan adanya Pelabuhan ini sudah dapat meningkatkan hasil tangkapan bagi para nelayan yang ada. Selain itu, proses pembongkaran muatan nelayan menjadi lebih mudah begitu pula dengan akses turun naiknya nelayan ketika ingin melaut menjadi lebih mudah. Selanjutnya, akses pasar yang bersebelahan dengan Pelabuhan memudahkan nelayan untuk dapat langsung menjualnya kepada para pedagang. Hal tersebut tentu menjadi sebuah keuntungan bagi masyarakat dan nelayan ketika ingin melakukan aktivitas jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin As, Z. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), 84–122. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. (n.d.). *Jumlah Pulau*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan RI. Retrieved June 19, 2023, from <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>
- George, E. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Kalalo, M. M. K., Kimbal, M., & Kimbal, A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERMINAL TATELU DI KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA. *EKSEKUTIF Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1*(No. 1), 1–11. [file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/alfonkimbal,+Maria+Kalalo.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester%204/Kebijakan%20Sektor%20Publik/ksp/alfonkimbal,+Maria+Kalalo.pdf)
- Kristiyanti, M., Purwantini, S., & Santoso, W. (2020). PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI DALAM MENUNJANG KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN KABUPATEN BATANG. *Jurnal Saintek Maritim*, 21(1). [file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/262-147147396-1-PB.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester%204/Kebijakan%20Sektor%20Publik/262-147147396-1-PB.pdf)
- Mansur, J. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 324–334. [file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/7713-24106-1-PB.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester%204/Kebijakan%20Sektor%20Publik/ksp/7713-24106-1-PB.pdf)
- Undang-Undang RI Nomor 43 Tentang Wilayah Negara, Pub. L. No. 43 (2008). [file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/UU Nomor 43 Tahun 2008.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester%204/Kebijakan%20Sektor%20Publik/ksp/UU%20Nomor%2043%20Tahun%202008.pdf)
- Undang-Undang RI Nomor 7 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, Pub. L. No. 7 (2016). [file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/ksp/UU Nomor 7 Tahun 2016.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester%204/Kebijakan%20Sektor%20Publik/ksp/UU%20Nomor%207%20Tahun%202016.pdf)
- Salim, Wibowo, W., & Pratama, W. (2021). Studi Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng, Girisubo, Gunung Kidul. *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 23(1), 15–19. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v23i1.117>
- Septian, D. (2017). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN

KAWASAN TERPADU DAN PENDALAMAN ALUR PELAYARAN (Studi Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun). *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 41–73. file:///C:/Users/LENOVO/Documents/semester 4/Kebijakan Sektor Publik/747-Article Text-2841-1-10-20181030.pdf

Setiawan, H., Pane, A. B., & Lubis, E. (2019). Strategi Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Untuk Meningkatkan Fungsi Pelabuhan Perikanan. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 3(1), 59–72. <https://doi.org/10.29244/core.3.1.59-72>

Usman, H., & Akbar, P. S. (2008). *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.